



PENYULUHAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI BUMDES DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI NEGERI SULI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Jeanly Waisapy

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Pattimura

Corresponding Author: jeanly Waisapy

jeanlywaisapy@gmail.com

Received 3 Agustus 2025; **Accepted** 20 Oktober 2025; **Online Published** 30 Oktober 2025

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi ekonomi secara kolektif. Di Negeri Suli, keberadaan BUMDes belum dioptimalkan, khususnya dalam hal pemahaman mengenai kedudukan hukum, fungsi strategis, dan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan penyuluhan kepada aparatur desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat terkait posisi BUMDes dalam sistem pemerintahan desa serta mekanisme pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi permasalahan, pemberian materi penyuluhan, pelatihan teknis pengelolaan keuangan, dan evaluasi akhir. Kegiatan ini sejalan dengan *Indikator Kinerja Utama (IKU)* Perguruan Tinggi dan *Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)* UNPATTI, terutama dalam meningkatkan peran dosen di masyarakat dan memberdayakan potensi lokal. Implementasi IPTEKS mencakup pengenalan perangkat pencatatan keuangan berbasis digital sederhana serta pemahaman kerangka regulasi pengelolaan BUMDes. Diharapkan, kegiatan ini dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMDes, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan Keuangan, Penyuluhan, Partisipasi Masyarakat, Negeri Suli

PENDAHULUAN

Negeri Suli merupakan salah satu negeri adat yang terletak di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Secara geografis dan sosial budaya, Negeri Suli memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang cukup besar, antara lain di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis komunitas. Potensi ini seharusnya menjadi modal dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Namun, hingga saat ini pemanfaatan potensi tersebut belum optimal. Hal ini tercermin dari belum terkelolanya sumber daya secara terarah, berkelanjutan, dan berbasis kelembagaan desa. Salah satu instrumen strategis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa sebagai penggerak

ekonomi lokal adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes Negeri Suli telah terbentuk secara struktural, namun keberadaannya belum memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun kesejahteraan masyarakat. Hambatan utama dalam pengelolaan BUMDes adalah rendahnya pemahaman aparatur desa dan pengurus BUMDes tentang landasan hukum, fungsi, serta peran strategis BUMDes dalam tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, sistem manajemen dan tata kelola keuangan BUMDes masih bersifat konvensional, tidak terdokumentasi dengan baik, serta belum mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan

efisiensi. Kondisi ini menimbulkan keraguan dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes.

Kurangnya pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan dari pihak akademisi maupun pemerintah daerah menyebabkan kapasitas pengurus BUMDes tidak berkembang secara optimal. Partisipasi masyarakat juga masih rendah karena minimnya sosialisasi serta ketidakjelasan informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana BUMDes. Dengan demikian, BUMDes belum mampu berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat mengenai dasar hukum, fungsi, dan peran strategis BUMDes dalam pembangunan desa.
2. Memberikan edukasi dan pelatihan terkait tata kelola keuangan BUMDes yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.
3. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pemanfaatan, dan keberlanjutan BUMDes sebagai aset bersama desa.

Pelaksanaan kegiatan ini relevan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Pattimura, yaitu keterlibatan dosen dalam pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan hasil kegiatan oleh masyarakat, serta partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Selain itu, kegiatan ini selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) PKM UNPATTI, yang menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan teknologi tepat guna.

Melalui kegiatan ini diharapkan pengelolaan BUMDes Negeri Suli dapat ditingkatkan secara profesional dan berkelanjutan. Dengan penguatan aspek regulasi, akuntabilitas keuangan, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat, BUMDes diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Negeri Suli disusun secara sistematis dan partisipatif agar menghasilkan dampak yang optimal bagi peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus BUMDes. Tahapan kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, pemberdayaan, dan pendampingan berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Koordinasi Awal dan Survei Lapangan

Tahap awal pelaksanaan diawali dengan koordinasi resmi bersama Pemerintah Negeri Suli, pengurus BUMDes, dan tokoh masyarakat. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh izin pelaksanaan, menyepakati jadwal kegiatan, serta menyelaraskan tujuan program dengan kebutuhan mitra. Selanjutnya dilakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi kondisi faktual BUMDes, tingkat pemahaman pengelola terhadap fungsi dan regulasi, serta hambatan dalam pengelolaan keuangan. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan pengisian kuesioner sederhana.

2. Penyusunan Materi dan Modul Penyuluhan

Berdasarkan hasil survei, tim pengabdian menyusun materi dan modul penyuluhan yang mencakup:

- Landasan hukum BUMDes (UU No. 6 Tahun 2014, Permendes No. 4 Tahun 2015, dan regulasi teknis lainnya).
- Struktur organisasi dan peran strategis BUMDes dalam pembangunan desa.
- Prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan terdokumentasi.

Seluruh materi disesuaikan dengan karakteristik lokal Negeri Suli, menggunakan bahasa komunikatif, serta dilengkapi contoh kasus dan format dokumen yang dapat langsung diterapkan.

3. Pelaksanaan Penyuluhan dan Diskusi Interaktif

Penyuluhan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini membahas:

- Legalitas dan struktur organisasi BUMDes.

- Fungsi ekonomi, sosial, dan pemberdayaan BUMDes.
- Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan yang sesuai regulasi.

Metode partisipatif digunakan untuk mendorong peserta aktif bertanya, berbagi pengalaman, dan memberikan solusi terhadap permasalahan internal BUMDes.

4. Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pada tahap ini peserta diberikan pelatihan teknis yang mencakup:

- Pengenalan dasar akuntansi sederhana untuk BUMDes.
- Penyusunan buku kas umum, laporan laba rugi, dan neraca sederhana.
- Pelatihan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan berbasis Excel atau perangkat lunak gratis.
- Simulasi transaksi keuangan nyata, mulai dari penerimaan, pengeluaran hingga penyusunan laporan periodik.

5. Pendampingan Implementasi

Pendampingan diberikan secara langsung kepada pengurus BUMDes untuk memastikan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari. Kegiatan meliputi:

- Bimbingan penggunaan format administrasi dan aplikasi pencatatan keuangan.
- Monitoring, koreksi kesalahan pencatatan, serta penataan arsip dokumen keuangan.
- Penyusunan laporan keuangan bulanan/semestral sebagai bentuk aplikasi keterampilan.

6. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut

Evaluasi program dilakukan melalui kuesioner, wawancara, serta penilaian terhadap hasil latihan dan implementasi. Evaluasi bertujuan menilai pemahaman, keterampilan, dan tingkat perubahan perilaku setelah kegiatan. Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan PKM yang disertai rekomendasi untuk penguatan BUMDes ke depan. Selain itu, disepakati rencana tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan, pembinaan rutin, serta

peluang kerja sama jangka panjang antara perguruan tinggi dan Pemerintah Negeri Suli.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di BUMDes Negeri Suli berfokus pada penerapan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) guna memperkuat tata kelola keuangan desa secara modern, transparan, dan akuntabel. Inovasi utama yang diimplementasikan adalah Sistem Keuangan BUMDes berbasis digital menggunakan teknologi *cloud computing*, yakni Google Sheets dan Google Form. Sistem ini dirancang agar dapat diterapkan dalam lingkungan pedesaan dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur, tingkat literasi digital aparatur desa, serta kebutuhan pengelolaan keuangan BUMDes secara efektif dan efisien.

1. Implementasi IPTEKS dalam Tata Kelola Keuangan

IPTEKS yang diimplementasikan mencakup empat pilar utama:

1. Aspek hukum dan regulasi,
2. Teknologi pengelolaan keuangan digital,
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan
4. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa.

Sistem ini disusun berdasarkan landasan yuridis yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Oleh karena itu, sistem keuangan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

2. Spesifikasi Sistem Keuangan Digital

Sistem Keuangan BUMDes berbasis digital ini disajikan dalam bentuk lembar kerja Google Sheets yang terintegrasi dengan beberapa *sheet*, antara lain:

- **Sheet Transaksi Harian**, berfungsi mencatat pemasukan dan pengeluaran secara real time.

- **Sheet Laporan Bulanan**, yang secara otomatis merekapitulasi transaksi harian.
- **Sheet Neraca dan Arus Kas**, untuk menampilkan posisi keuangan secara menyeluruh dan mutakhir.
- **Dashboard Visualisasi**, menyajikan grafik arus kas, saldo, dan laporan lain secara informatif sehingga mudah dipahami oleh pengurus maupun masyarakat.

Ukuran file sistem sangat ringan (kurang dari 5 MB), sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer, laptop, atau ponsel pintar dengan koneksi internet minimal. Penyimpanan data dilakukan secara langsung melalui *cloud* (Google Drive), sehingga aman, mudah diakses kapan saja, dan tidak memerlukan perangkat lunak berbayar.

3. Penerapan Teknologi dan Inovasi di Masyarakat

Penerapan produk teknologi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari sosialisasi, pelatihan teknis, hingga pendampingan intensif kepada pengurus BUMDes dan aparatur desa. Sistem digital ini dilengkapi dengan komponen utama sebagai berikut:

- **Formulir Transaksi Online (Google Form)**
Untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, transaksi usaha, atau pembelian barang. Data dari formulir langsung terintegrasi ke dalam Google Sheets.
- **Lembar Keuangan Otomatis (Google Sheets)**
Menampilkan laporan harian, bulanan, dan tahunan secara otomatis berdasarkan input data.
- **Dashboard Visualisasi Keuangan**
Menampilkan grafik arus kas, saldo terkini, pendapatan, dan pengeluaran secara visual, sehingga memudahkan pengambilan keputusan.
- **Akses Multi-User**
Sistem dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa perangkat dengan tingkat otorisasi akses tertentu (admin, operator, kepala BUMDes).

Sistem ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis unit usaha BUMDes seperti perdagangan, jasa wisata, atau lembaga keuangan mikro (simpan pinjam).

4. Manfaat dan Dampak Pengabdian

Penerapan IPTEKS ini memberikan dampak nyata terhadap penguatan tata kelola keuangan BUMDes Negeri Suli, antara lain:

- **Efisiensi waktu dan tenaga**, karena pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara otomatis.
- **Minimasi kesalahan perhitungan**, melalui sistem perhitungan otomatis yang mengurangi risiko human error.
- **Peningkatan transparansi dan akuntabilitas**, karena laporan keuangan dapat diakses oleh perangkat desa maupun pihak terkait kapan saja.
- **Peningkatan kapasitas SDM desa**, melalui pelatihan penggunaan teknologi informasi dan pendampingan aplikasi sistem keuangan digital.
- **Mendorong partisipasi masyarakat**, karena laporan keuangan dapat disajikan secara terbuka pada forum musyawarah desa.

5. Implikasi Keberlanjutan Program

Program ini dirancang agar berkelanjutan dan dapat dikembangkan secara mandiri oleh pengurus BUMDes. Dengan kapasitas penyimpanan hingga 15 GB dari Google Drive dan desain file yang sederhana (kurang dari 10 MB), sistem ini sangat memungkinkan untuk terus diperbaharui sesuai kebutuhan. Selain itu, pendekatan pengabdian ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat desa dalam mengembangkan inovasi berbasis kebutuhan lokal.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya menghasilkan sebuah sistem keuangan digital yang fungsional dan mudah dioperasikan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan desa. Melalui penerapan sistem keuangan berbasis teknologi cloud, BUMDes Negeri Suli kini memiliki instrumen yang lebih transparan,

akuntabel, serta efisien dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan arus keuangan. Sistem ini membantu mempercepat proses administrasi keuangan, meminimalkan kesalahan manual, dan memberikan akses data secara real time kepada pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan literasi digital aparaturnya desa dan pengurus BUMDes. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan selama proses implementasi telah membangun pemahaman dan keterampilan baru dalam penggunaan teknologi informasi, sekaligus menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan berbasis data. Munculnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola desa menjadi salah satu capaian penting dari program ini.

Lebih jauh lagi, penguatan tata kelola keuangan melalui IPTEKS ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Transparansi laporan keuangan yang dapat diakses dan dipertanggung jawabkan secara terbuka menjadi dasar dalam membangun partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan desa.

Dengan berbagai capaian tersebut, BUMDes Negeri Suli diharapkan dapat menjadi model inspiratif bagi desa-desa lain dalam menerapkan teknologi sederhana namun efektif untuk pengelolaan keuangan desa. Keberhasilan ini bukan hanya menunjukkan kesiapan desa menghadapi era digitalisasi, tetapi juga menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari desa apabila didukung oleh sinergi yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, dan perguruan tinggi. Secara keseluruhan, program pengabdian ini diharapkan dapat berkelanjutan dan terus dikembangkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola desa yang profesional, mandiri, transparan, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUMDes*.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Suharto, E. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
4. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
5. Kurniawan, R. (2021). "Transparansi Keuangan BUMDes di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Desa*, 6(2), 34-47.
6. Nuryanti, T. & Yuliana, A. (2019). "Strategi Penguatan Kapasitas BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 12-20.
7. Yuwono, G. (2023). *Digitalisasi Keuangan Desa*. Jakarta: Kompas Gramedia.
8. Farida, L. (2016). "Kapasitas Kelembagaan BUMDes dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi Desa." *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 2(3), 45–58.